



SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
X	RADAR BENGKULU

KAMIS, 29 NOVEMBER 2018

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Warga Minta Pencairan DD Tahap ke 3 Ditunda, Karena Ada Dugaan Mark Up

RBI, SELUMA - Satu persatu, kasus dugaan penyimpangan dana desa terus saja mencuat, meski hingga akhir tahun 2018 ini belum ada satupun kasus dugaan penyimpangan Dana Desa ditindaklanjuti.

Terbaru, dugaan kasus penyimpangan dana desa terjadi di Desa Talang Sali Kecamatan Seluma Timur. Terkait dugaan itu, sejumlah warga yang tidak puas, telah melayangkan aduan pada Rabu (24/10) yang ditujukan ke Inspektorat, dengan ditembuskan ke Camat Seluma Timur, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat.

Warga menduga, pembangunan badan jalan desa Talang Sali Kecamatan Seluma Timur yang berasal dari Dana Desa (DD) sepanjang 5 Kilo meter dengan lebar 5,800 meter di-

duga di mark up. Proses pembangunan jalan ini sendiri diserahkan kepada pihak ketiga. Dugaan mark up ini muncul pasca pengerjaan jalan dianggap selesai.

Pasalnya, pihak ketiga yang sebelumnya sudah melakukan negosiasi anggaran mengaku nominal yang tertera di Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) tidak sesuai dengan nominal yang disepakati.

Keganjilan yang dirasa yakni nominal yang disetor berbeda dengan nominal yang tertera dalam SPJ tersebut. "Jumlah anggaran yang tertera di SPJ sebesar Rp213 juta sedangkan nominal yang dipihak ketigakan hanya Rp132.000. Jadi masyarakat mempertanyakan kemana dana sisa sebanyak Rp 81 juta," kata Hendra Aswari, warga Desa Talang Sali Kecamatan Seluma

Timur, Selasa (27/11).

Penolakan terhadap pengerjaan proyek yang belum selesai tersebut ditolak dan ditanda tangani sejumlah warga, dan meminta agar pihak TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) untuk segera membayarkan sisa pembayaran dan melaksanakan kelanjutan pembangunan jalan. "Kami meminta agar pihak Dinas PMD dan BPKD tidak membayarkan dahulu sisa 40 persen DD ditahap ketiga, sebelum pekerjaan dilanjutkan," kata dia.

Jika hal ini diabaikan, warga mengancam akan memagar badan jalan, melanjutkan hearing ke DPRD dan mengawal kasus tersebut hingga tuntas. "Jalan tersebut belum layak untuk di gunakan, karena proses pengerjaanya belum selesai," kata Hendra.

Sementara itu, pihak



KAMIS, 29 NOVEMBER 2018

SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
X	RADAR BENGKULU	

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Warga Minta Pencairan DD Tahap ke 3 Ditunda, Karena Ada Dugaan Mark Up

ketiga selaku pelaksana proyek yang dikerjakan CV Maju, Asep Priawan mengaku, dari besarnya anggaran yang di SPjkan sebesar Rp 213 juta itu, pihaknya hanya disodorkan SPj proyek senilai Rp 132.juta. Dalam penerapannya, nilai itu hanya untuk pembukaan jalan,tidak termasuk pembangunan gorong-gorong,siring dan ganti rugi tanam tumbuh. Namun,pihak ketiga menolak untuk menandatangani SPj yang disodorkan pihak TPK untuk menandatangani SPj senilai Rp 213 juta.

"Dari dana senilai Rp 132 juta itu, baru dibayarkan sebesar Rp 87 juta. Sisanya sebesar Rp 45 juta hingga kini belum terbayarkan," kata dia.

Mendapati hal tersebut, pihak kontraktor dengan tegas menolak menandatangani SPJ

tersebut.

Terpisah, menyikapi polemik itu, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Seluma, Drs. Sukran Efendi mengaku belum menerima surat tembusan atas laporan warga Desa Talang Sali Kecamatan Seluma Timur. "Kalau masalah rekomendasi pencairan, itu tidak bisa dikaitkan dengan adanya masalah yang mencuat di desa, dan itu harus direkomendasikan untuk dicairkan.Artinya,termasuk Desa Talang Sali sudah direkomendasikan untuk di cairkan. Saat ini, dari 183 desa di Seluma, hanya sekitar 3 desa yang belum menerima rekom pencairan tahap ketiga, yakni 1 desa di Kecamatan Semidang Alas Maras dan 2 desa di Kecamatan Air Periukan," demikian kata Sukran.(one)